

UANG DAN LEMBAGA KEUANGAN : UASAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Mochamad Bhayu Widhy Pramono

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrack

Money and financial institutions about micro, small and medium enterprises
The Role, Characteristics, Concepts and Definitions of MSME Laws governing
MSME in Indonesia How to develop MSME from a theoretical perspective, grow
and develop MSME capabilities so that businesses can be resilient and independent.
The definitions and concepts of MSME differ by country. Therefore, it is indeed
difficult to compare the importance or role of MSMEs between countries. There is
no general agreement in distinguishing a MIE from a UK, or a UK from a MW, and
the latter is from a UB. Development of SMEs in Indonesia experiences several
obstacles in its operations. The knowledge of SME producers or owners in
Indonesia about technology is far from enough. Most producers in Indonesia still
use equipment that is still traditional. So that production costs actually become
higher than if the producers use modern machines

Abstrak

Uang dan lembaga keuangan tentang usaha mikro kecil menengah Peran,
Karakteristik, Konsep, dan Definisi UMKM Hukum yang mengatur UMKM di
Indonesia Bagaimana perkembangan UMKM dari perspektif teori, menumbuhkan
dan mengembangkan kemampuan UMKM agar usahanya dapat tangguh dan
mandiri.

Definisi dan konsep UMKM berbeda menurut Negara. Oleh karena itu,
memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antarnegara. Tidak

ada kesepakatan umum dalam membedakan sebuah MIE dari sebuah UK, atau sebuah UK dari sebuah UM, dan yang terakhir ini dari sebuah UB.

Pengembangan UKM di Indonesia mengalami beberapa hambatan dalam operasionalnya. Pengetahuan para produsen atau pemilik UKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional. Sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para produsen menggunakan mesin-mesin modern

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ini merupakan salah satu usaha yang berperan besar dalam menganekaragamkan produk-produk ekspor Indonesia dan menjadi andalan dalam perolehan devisa. Dalam sejarah nya, sepanjang pemerintahan orde baru, UMKM sangat dikesampingkan keberadaannya. Berbeda dengan usaha besar yang selalu diberikan keleluasan dalam berbagai hal. Namun, UMKM justru dapat bertahan dalam menghadapi kebijakan kebijakan tersebut. UMKM sangat lah penting keberadaannya di Indonesia karena selain dapat menambah pendapatan UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di perdesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagian motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. UMKM di perdesaan terutama bisa berperan sebagai mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi diluar sector pertanian, dan ini sangat penting karena kapasitas penyerapan tenaga kerja dari sector pertanian di banyak

wilayah ditanah air semakin mengecil karena banyak hal, termasuk luas lahan yang semakin sempit.

Namun, hingga sekarang dibanding UMKM dinegara maju UMKM di Negara Indonesia masih lemah dalam banyak hal termasuk masih lebih berpusat pada teknologi rendah seperti makanan, pakaian jadi, mebel dan kerajinan. Maka dari itu disini kami akan membahas lebih mendetail mengenai UMKM dan perkembangan UMKM di Indonesia serta hukum yang mengatur mengenai UMKM di Indonesia.



BAB II

PEMBAHASAN

Peran, Konsep dan Definisi UMKM

Dari perspektif dunia, diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara yang sedang berkembang (NSB), tetapi juga di Negara-negara maju (NM). Di NM, UMKM sangat penting karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja di bandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di NSB, tetapi juga di banyak Negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari UB.

Di NSB di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk non-faktur dan inovasi serta penembangan teknologi, peran UMKM di NSB masih relative rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang sangat mencolok dengan UMKM di NM.

Di dalam literature diakui secara luas bahwa di NSB, UMKM sangat penting karena karakteristik-karakterik utama mereka yang berbeda dengan UB, yakni sebagai berikut :

1. Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah UB), terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK)
2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan

kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.

3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama UMI, di NSB berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
4. UMKM memakai teknologi-teknologi yang lebih “cocok” (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern / UB) terhadap proporsi-proporsi dari faktor-faktor produksi dan kondisi local yang ada di NSB, yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah (walaupun jumlahnya bervariasi menurut Negara atau wilayah di dalam sebuah Negara), tetapi modal serta sumber daya (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan yang sangat terbatas.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan, banyak UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi di Indonesia dilanda suatu krisis besar pada tahun 1997-1998.
6. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko dengan melakukan investasi.
7. (Masih berkaitan dengan butir 6) Terbukti bahwa pada umumnya pengusaha UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman dari saudara atau kerabat, atau dari pemberi-pemberi kredit informal, pedagang atau pengumpul, pemasok bahan baku, dan pembayaran di muka dari konsumen-konsumen.
8. Walaupun banyak barang yang diproduksi dari UMKM juga untuk masyarakat kelas menengah dan atas (untuk yang terakhir ini proporsinya lebih kecil), terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah untuk barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relative murah, seperti pakaian jadi dengan desain sederhana, mebel dari kayu,

bambu, dan rotan, barang-barang lainnya dari kayu, alas kaki, dan alat-alat dapur dari aluminium dan plastic.

9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM (khususnya UK dan UM yang mampu meningkatkan produktifitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi) walaupun Negara berbeda mungkin punya pengalaman berbeda dalam hal ini, tergantung pada banyak factor. Factor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sector terkit pada khususnya.
10. Seperti sering dikatakan di dalam literature, satu keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relative terhadap pesaingnya UB.

Oleh karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM (paling tidak secara potensial seperti yang diuraikan diatas tersebut, tidak heran kenapa pemerintah-pemerintah di hampir semua NSB (termasuk Indonesia) sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan.

Sebagian besar pengusaha mikro di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha mikro berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Disamping itu, latar belakang menjadi pengusaha mikro karna factor keturunan, yakni meneruskan usaha keluarga.

Karakteristik lainnya adalah dalam struktur umur pengusaha. Berdasarkan data BPS, struktur umur pengusaha di UMKM menurut kelompok umur menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga (34,5 persen) pengusaha UMKM berusia diatas 45 tahun, dan hanya sekitar 5,2 persen pengusaha UMKM yang berumur dibawah 25 tahun.

Komposisi tenaga kerja tidak dibayar memiliki kecenderungan berbanding terbalik dengan skala usaha, yang artinya semakin besar skala usaha semakin kecil komposisi tenaga kerja tanpa upah.

Di Indonesia, definisi UMKM di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab I (Ketentuan Umum), pasal I dari UU tersebut, dinyatakan bahwa UMI adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria UMI sebagaimana diatur dalam UU tersebut. UK adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari UM atau UB yang memenuhi kriteria UK sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan UM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari UMI, UK atau UB yang memenuhi kriteria UM sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Hukum yang Mengatur UMKM di Indonesia

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan
6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
7. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

8. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Perkembangan UMKM dari Perspektif Teori

Teori-teori klasik

Literature mengenai UMKM di NSB pada umumnya membahas UMKM di industri manufaktur, dan perkembangan literature ini diawali oleh munculnya artikel dan Staley dan Morse tahun 1965. Studi mereka didasarkan pada pengalaman dari NM dan NSB, dan mereka mengidentifikasi 3 kategori kondisi bagi keberadaan UMKM, yakni lokasi, proses pengolahan, dan pasar atau tipe dari produk yang dihasilkan. Operasi-operasi pengolahan yang terpisah, kerajinan, atau pekerjaan tangan yang sangat membutuhkan presisi dan proses perakitan, pencampuran, dan penyelesaian akhir yang sederhana adalah kondisi-kondisi paling penting dari proses pengolahan bagi keberadaan UMKM. Sedangkan kondisi pasar yang cocok bagi perkembangan UMKM adalah dalam bentuk produk diferensiasi dengan skala ekonomi yang terendah dan melayani pasar-pasar kecil.

Dari kondisi-kondisi tersebut, Staley dan Morse (1965) beragumen bahwa khususnya kegiatan-kegiatan pengolahan yang terpisah atau spesifik (misalnya UMKM memproduksi komponen-komponen tertentu untuk UB) dan produk diferensiasi dengan skala ekonomi yang rendah adalah factor-faktor yang menjelaskan paling penting yang menjelaskan keberadaan UMKM di NSB.

Dalam pembahasan system-sistem industri dan peran UMKM di dalam sistem-sistem tersebut serta pola perkembangan dari kelompok usaha itu di NSB, perhatian umumnya terfokus pada karya-karya yang terkenal, termasuk dari Hoselized (1959), Staley dan Morse (1965), serta Anderson 1982. Pemikiran-

pemikiran mereka diklasifikasikan sebagai teori-teori “klasik” mengenai perkembangan UMKM. Sedangkan, yang masuk dalam literature yang memunculkan paradigm baru atau disebut juga teori-teori “modern” mengenai perkembangan UMKM adalah Berry dan Mazumdar (1991) serta Levy (1991). Teori-teori secara eksplisit membahas pentingnya jaringan-jaringan subcontracting dan keuntungan-keuntungan ekonomi dari aglomerasi dan pengelompokan, atau umum disebut cluster, bagi perkembangan UMKM.

Teori-teori modern

Pada dekade 80-an, muncul tesis flexible specialization (FS) dan sejak saat itu sudah banyak makalah-makalah seminar, penelitian-penelitian, artikel-artikel di jurnal-jurnal, dan buku-buku yang ditulis mengenai isu baru ini. Munculnya tesis ini adalah hasil dari suatu perdebatan panjang mengenai bagaimana menginterpretasikan pola produksi global yang baru akibat tekanan-tekanan globalisasi dan restrukturisasi industri. Perubahan pola produksi tersebut juga membawa perubahan terhadap cara mengorganisasikan produksi dan tenaga kerja. Beberapa peneliti berargumen bahwa produksi global sedang mengalami suatu transformasi dari produk massal (fordist) ke produksi dalam volume kecil. FS dikenal sebagai salah satu pola baru tersebut yang menggantikan pola produksi fordist (Piore dan Sabel, 1984). Konsep FS berasosiasi erat dengan buku yang terkenal dari Piore dan Sabel (1984) mengenai “the second industrial divide”. Di dalam buku ini mereka mendiskusikan munculnya kembali lokasi-lokasi pengrajin di sejumlah negara di Eropa Barat, yakni Italia, Austria, dan Jerman. Dalam mempelajari perkembangan dari lokasi-lokasi pengrajin tersebut, Piore dan Sabel (1984) menegaskan bahwa UMKM di lokasi-lokasi itu telah menjadi bentuk yang dominan dari organisasi industri. UMKM tersebut dikenal sebagai perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan pekerja-pekerja dengan keterampilan tinggi dan multi, menggunakan mesin-mesin yang “fleksibel” yang mengandung teknologi-teknologi paling akhir dan membuat dalam volume kecil sejumlah produk-produk khusus yang berbeda untuk pasar global. Sedangkan, Holt (1996) memberi penilaiannya mengenai kualitas dari UMKM yang membuat kelompok usaha ini menjadi sangat penting di dalam ekonomi: *small firms are supposedly leaner, less bureaucratic, more entrepreneurial and more innovative than large firms and, as a result, it is supposed that they grow further and faster than established firms. Small firms are thought to be especially important as wealth creators and job creators,*

and they are also considered to be more committed to their local communities than large firms, both in the sense of sourcing and recruiting locally and in the sense of being less geographically footloose than large companies.

Literatur mengenai tesis FS mengatakan secara eksplisit bahwa teknologi-teknologi baru (seperti komputer dan alat-alat monitor dan mesin kontrol pabrik) membuat skala ekonomi menjadi lebih efisien, dan ini semua mempromosikan kelayakan relatif dari UMKM di dalam era globalisasi. Kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan suatu industri untuk memenuhi perubahan-perubahan pasar yang cepat (khususnya pasar global) dengan tepat waktu, murah, dan efisien telah menciptakan suatu peran baru bagi UMKM di NM. Jadi, peran baru UMKM ini di dalam ekonomi bisa digunakan sebagai suatu argumen untuk menentang proposisi dari Anderson, diantara beberapa lainnya, yang telah dibahas sebelumnya, yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang ekonomi akan dikuasai oleh UB (dalam output maupun kesempatan kerja).

Penelitian Hoselitz, Parker (1979) dan Anderson (1982) juga mengembangkan tipologi fase pertumbuhan yang berbasis pada pengalaman dari NM untuk menjelaskan perubahan struktur skala usaha di sektor industry menurut wilayah dan waktu di NSB. Menurut pendekatan ini, di dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan atau bisa juga disebut evolusi dari komposisi dari kegiatan manufaktur-manufaktur, jika diklasifikasikan menurut skala, berlangsung melalui tiga fase. Dalam fase pertama, yakni tahap “awal” pembangunan industri (ekonomi masih dicirikan sebagai ekonomi agraris), UMI, disebut juga industry-industri rumah tangga atau kegiatan-kegiatan pengrajin (tipe paling tradisional dari perusahaan-perusahaan di industri manufaktur) paling dominan, baik dalam jumlah unit usaha maupun dalam jumlah pekerja, dilihat dari persentasenya dari jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur. Ini adalah suatu fase dari industrialisasi, di mana terdapat sejumlah besar UMI (kebanyakan di pedesaan) berdampingan dengan sejumlah kecil UB (kebanyakan adalah perusahaan asing atau badan usaha milik Negara yang berlokasi di perkotaan atau kota-kota besar). Dalam tahap ini, UMI lebih terkonsentrasi di industry-industri seperti pakaian jadi, pandai besi, alas kaki, kerajinan, bahan-bahan bangunan sederhana, serta makanan dan minuman. Di NSB, kegiatan-kegiatan produksi di subsector-subsector tersebut relative mudah dilakukan. Khususnya industry-industri pakaian jadi, makanan dan minuman, serta kerajinan, kebutuhan modal awal sangat sedikit dan produsen/pengusaha tidak perlu memiliki pendidikan formal yang tinggi dan tidak perlu ada tempat khusus untuk kegiatan

produksi. Mungkin untuk alasan ini, kegiatan produksi UMI di kelompok-kelompok industri tersebut lebih banyak dilakukan oleh perempuan dan anak-anak sebagai suatu kegiatan paro waktu, dan dilakukan di dalam rumah pemilik usaha/pengusaha. Pendapatan dari kegiatan-kegiatan UMI tersebut sangat penting, baik sebagai sumber pendapatan utama atau satu-satunya maupun sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kebanyakan UMI adalah usaha sendiri tanpa pekerja (di dalam literatur umum disebut *self-employment* atau unit usaha satu orang di mana pemilik melakukan semua pekerjaan).

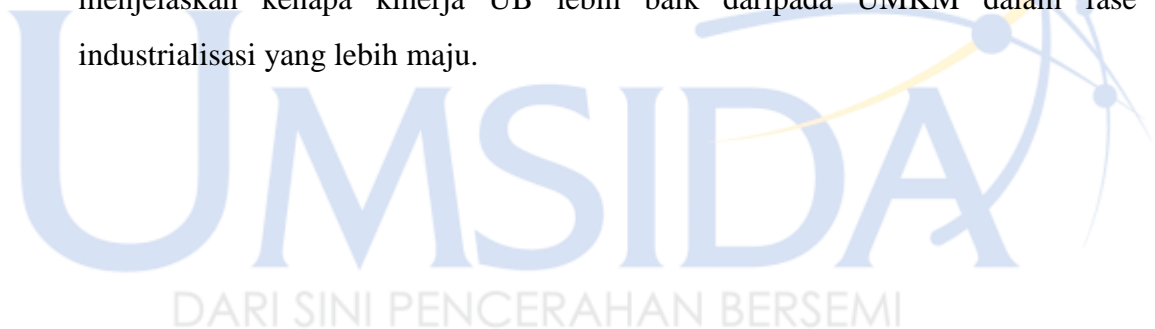
Dalam tahap ini, juga terdapat banyak kegiatan UMI yang erat kaitannya dengan produksi di sektor pertanian, baik dalam bentuk keterkaitan produksi ke depan, yakni UMI menyuplai berbagai *input* ke pertanian, maupun dalam bentuk keterkaitan produksi ke belakang, yakni UMI mengolah *output* dari pertanian, misalnya industri-industri makanan dan minuman. Selain itu, keterkaitan dalam kegiatan produksi antara UMI dan pertanian juga secara tidak langsung lewat keterkaitan konsumsi, yakni UMI menyediakan kebutuhan-kebutuhan makanan dan nonmakanan bagi penduduk pedesaan yang pada umumnya adalah rumah tangga-rumah tangga petani.

Dalam fase kedua, di wilayah-wilayah yang lebih berkembang dengan pendapatan per kapita lebih tinggi, UK dan UM (sebut UKM) mulai muncul dan tumbuh pesat, dan secara perlahan menggeser UMI di sejumlah subsektor manufaktur. Ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan ekspansi UKM pada fase kedua ini. Steel (1979), misalnya, menekankan salah satunya adalah pentingnya pasar (dia sebut *cash market*, yang artinya pasar dimana penjualan dan pembelian dilakukan dengan uang) yang berkembang: *Increased urbanization and expanding cash markets give rise to a shift from traditional household activities to complete specialization of the entrepreneur in small scale production and increased use of apprentice and hired labor.*

Dalam fase ketiga, pada tahap “terakhir” pembangunan, pabrik-pabrik besar (UB) menjadi dominan, menggantikan UKM (dan juga UMI yang masih ada) di sejumlah industri. Menurut Anderson (1982) fase ini sebagian adalah suatu produk dari fase kedua, sejak pertumbuhan *output* dan kesempatan kerja di UB dapat dibagi

ke: (a) perkembangan skala usaha dari yang sebelumnya UKM menjadi UB, dan (b) perluasan skala produksi dari UB. Namun demikian, ekspansi UB dalam fase ini bisa juga disebabkan sebagian oleh munculnya UB baru (yang perkembangannya sejak awal tidak melalui struktur skala), yang tidak diperhitungkan secara eksplisit dalam analisisnya Anderson.

Dalam fase terakhir ini, pemakaian skala ekonomi dalam produksi, manajemen, pemasaran dan distribusi (tergantung pada tipe produk dan fleksibilitas dalam produksi); keunggulan teknologi; efisiensi manajemen; koordinasi produktif; akses ke jasa-jasa infrastruktur pendukung serta keuangan eksternal yang lebih baik; dan pendanaan konkesi dengan insentif investasi, struktur tarif, dan subsidi pemerintah, semuanya adalah penyebab-penyebab atau merupakan insentif utama bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang menjadi lebih besar. Dalam kenyataannya, faktor-faktor ini sering kali lebih tersedia atau menguntungkan UB atau usaha modern daripada UMKM, khususnya UMI, dan hal ini dapat menjelaskan kenapa kinerja UB lebih baik daripada UMKM dalam fase industrialisasi yang lebih maju.



BAB III

PENUTUP

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM merupakan sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Pertumbuhan UKM di Indonesia membawa dampak baik bagi perkembangan ekonomi. Satu hal yang patut menjadi perhatian adalah rasio kredit bermasalah alias non performing loan (NPL). Selain itu, UKM juga mampu meningkatkan jumlah pendapatan Negara. Selain bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tanpa disadari UKM juga telah mampu mengurangi angka pengangguran di masyarakat, sekaligus juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan UKM di Indonesia mengalami beberapa hambatan dalam operasionalnya. Pengetahuan para produsen atau pemilik UKM di Indonesia mengenai teknologi masih jauh dari cukup. Kebanyakan produsen di Indonesia masih menggunakan peralatan yang sifatnya masih tradisional. Sehingga biaya produksi malah menjadi lebih tinggi dibandingkan jika para produsen menggunakan mesin-mesin modern. Selain itu Indonesia juga dihadapkan pada kualitas SDM yang masih jauh dari standar yang ada. Kendala yang banyak dialami adalah faktor dana. Banyak calon pengusaha yang mengeluhkan mengenai keterbatasan dana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu dengan memberikan pembekalan serta penyuluhan untuk mengatasi masalah SDM, sehingga kualitas SDM yang dapat meningkat. Sedangkan untuk mengatasi masalah kekurangan dana pemerintah telah mengeluarkan program bagicalon pemilik UMKM yang mengalami kesulitan

dalam masalah pembiayaan. Pemerintah memberikan bantuan berupa kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh beberapa Bank di Indonesia yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu memerhatikan keadaan UMKM di Indonesia. Supaya kelangsungan perekonomian selalu terjaga, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.



DAFTAR PUSTAKA

TAMBUNAN.TULUS.2009.”UMKM DI INDONESIA”.Perpustakaan Nasional.Jakarta.

Tambunan.Tulus.”PEREKONOMIAN INDONESIA”.

<http://iamsyahputra.wordpress.com/2011/10/20/peranan-umkm-terhadap-pembangunan-ekonomi-indonesia/>

<http://id.shvoong.com/business-management/human-resources/2034751-peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>

repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/18076/H08mte.pdf

<http://diskop.padang.go.id/rendah-adopsi-teknologi-informasi-oleh-umk-di-indonesia/>

<http://www.scribd.com/doc/35101611/PERKEMBANGAN-UKM-BAGI-PEREKONOMIAN-INDONESIA>

http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengah

DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI